



# LAPORAN BULANAN BP3OKP PAPUA SELATAN

JANUARI 2026



OLEH:  
TIM BP3OKP PAPUA SELATAN





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Selatan dapat menyelesaikan Laporan Bulanan Kegiatan Januari 2026 ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus) yang berorientasi pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dan percepatan pembangunan berbasis kearifan lokal.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, BP3OKP Papua Selatan berkomitmen untuk memastikan Dana Otsus dimanfaatkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Selama bulan Januari 2026, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, mulai dari koordinasi lintas lembaga, advokasi kebijakan, hingga pendampingan teknis di bidang pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pembangunan.

Laporan ini juga memuat tantangan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut sebagai bahan perbaikan untuk bulan berikutnya. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat: pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, mitra pembangunan, serta kelompok kerja (Pokja) BP3OKP yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam proses pelaporan ini. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas kerja ke depan. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan Papua Selatan yang Cerdas, Sehat, dan Produktif.

**Merauke 9 Februari 2025**

**Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan**



**Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd.M.Si, MRSC**  
NIP: 999920240117145257



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Maksud dan Tujuan.....	1
1.2    Ringkasan Kelembagaan .....	1
1.2.1    Landasan/Dasar Aturan.....	1
1.2.2    Definisi .....	2
1.2.3    Struktur Kelembagaan.....	2
1.2.4    Tugas dan Fungsi .....	2
1.2.5    Ruang Lingkup Kegiatan.....	3
1.2.6    Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan	4
<b>BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN .....</b>	<b>6</b>
2.1    Rekapitulasi Kegiatan .....	6
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>16</b>
3.1    Kesimpulan .....	16
3.3    . Penutup .....	18



## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1 1.** Struktur BP3OKP Sesuai Perpres 121 Tahun 2022.....2



## DAFTAR TABEL

**Tabel 1. 1.** Daftar SDM Sesuai Struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan .....5



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan**

Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dan Daerah adalah untuk mengakomodir seluruh Aspirasi dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang sudah diusulkan pada Musrembang OTSUS tahun 2025 yang harus dikerjakan pada tahun 2026, dan target program Kerja tahun ini harus direalisasikan sesuai target-target yang sudah ditetapkan, sehingga kami minta Komitmen Kementerian terkait untuk mendukung program Kerja ini.

#### **1.2 Ringkasan Kelembagaan**

##### **1.2.1 Landasan/Dasar Aturan**

Landasan/dasar aturan BP3OKP/BPP, diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden, peraturan pemerintah, yang terurai sebagai berikut.

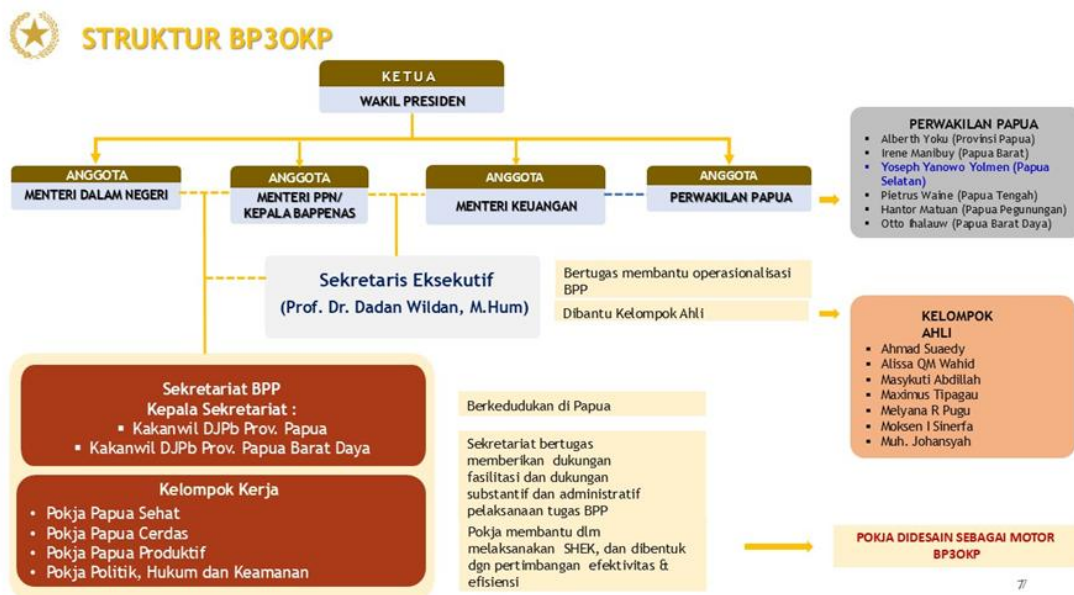
- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
- 5) Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-44/PB/2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
- 6) Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua
- 7) Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua

- 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru Di Provinsi Papua
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus

### 1.2.2 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

### 1.2.3 Struktur Kelembagaan



Gambar 1 1. Struktur BP3OKP Sesuai Perpres 121 Tahun 2022

### 1.2.4 Tugas dan Fungsi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan



pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
  - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
  - c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
  - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
  - e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden

### **1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Badan Pengarah Papua (BPP) melaksanakan kegiatan Program.

Adapun ruang lingkup kegiatan Anggota BPP beserta Pokja BPP PPS dalam pelaksanaan OTSUS Papua sesuai dengan pelaksanaan pembangunan Papua khususnya Papua Selatan secara general, sebagai berikut:

#### **a. Sinkronisasi Program dan Kebijakan**

- Menyatukan dan menyelaraskan program-program kerja dari berbagai instansi dan lembaga terkait di Provinsi Papua Selatan agar sejalan dengan kebijakan



nasional dan peraturan daerah terkait Otsus.

- Menyusun rencana kerja bersama yang memuat target, indikator keberhasilan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi. dengan arah kebijakan nasional serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

**b. Harmonisasi Data dan Informasi**

- Bersinergi dan berkolaborasi dalam mengintegrasikan data potensi, kebutuhan, dan perkembangan pendidikan di Papua Selatan guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

**c. Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Program**

- Menyusun laporan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi capaian dan kendala dalam pelaksanaan program serta merekomendasikan langkah perbaikan..

**d. Koordinasi Internal dan Eksternal**

- Melaksanakan pertemuan rutin dan dialog lintas sektor untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif antar anggota Pokja, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
- Menyusun mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap kegiatan berjalan sesuai rencana dan mampu menyesuaikan terhadap dinamika yang berkembang..

**e. Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya**

- Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota Pokja serta aparat terkait dalam bidang evaluasi, pengumpulan data, dan pengelolaan program.
- Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses pengawasan dan keberlanjutan program.

**f. Pelaporan dan Transparansi**

- Mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Papua Selatan.
- Menyebarkan hasil evaluasi dan perkembangan pelaksanaan program secara berkala dan terbuka.

**1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan**

Pelaksanaan tugas BP3OKP pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan didukung dengan SDM yang dapat dilihat pada Tabel 1. 1. Daftar SDM Sesuai Struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan, di bawah :



**Tabel 1. 1.** Daftar SDM Sesuai Struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan

<b>NO.</b>	<b>UNIT KERJA &amp; JABATAN</b>	<b>JLH ORG</b>
1.	Pimpinan : Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan	1 org
2.	Kelompok Kerja (POKJA) : 1. POKJA Papua Sehat	1 org
	: 2. POKJA Papua Cerdas	1 org
	: 3. POKJA Papua Produktif	1 org
	: 4. POKJA Papua Polhukam	- org
3.	Pendukung Administratif dan substantif : TIM Kerja dari KPPN/DJPB Kab. Merauke Provinsin Papua Salatan	5 org
4.	Staf/ Karyawan : Staf/karyawan yang diperbantukan kepada BP3OKP yaitu karyawan PPNPN	3 org

## BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN

### 2.1 Rekapitulasi Kegiatan

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Anggota BPP dan Pokja Sehat pada bulan Januari 2026 terurai sebagai berikut:

#### 1. NOTULEN RAPAT BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan bersama Bapak Menteri Transmigrasi, Bupati Boven Digoel dan Kepala OPD, pada Senin 26 Januari 2026 di Jakarta



#### **Usulan yang sudah disampaikan Kepada Bpk. Menteri Transmigrasi RI :**

- Perumahan Transmigrasi Lokal akan dibangun bagi Orang Asli Papua di Boven Digoel
- Penduduk yang masuk Transmigrasi Lokal akan diberikan Kompensasi selama 2 Tahun dan Transmigrasi Lokal ini akan didampingi oleh Petugas hingga mandiri didalam Management Usahanya.
- Perkebunan Karet akan dikembangkan terus di Boven Digoel dengan memberikan dukungan Investor luar sebagai Bapak angkat untuk mendampingi Petani Karet.
- Perkebunan Kopi Robusta akan dikembangkan di Boven Digoel dan akan selalu memberdayakan Transmigrasi Lokal Orang Asli Papua.
- Perlu dilakukan validasi Data Orang Asli Papua dari Boven Digoel, termasuk OAP yang pernah Eksodus ke PNG Tahun 1984, dan Data Kependudukan ini harus divalidasi oleh Dukcapil Boven Digoel sebagai bahan pengusulan untuk Transmigrasi Lokal.
- Transmigrasi di era Generasi Emas Indonesia (menuju 2045) bertransformasi menjadi strategi pembangunan kawasan yang inklusif dan berkelanjutan, bukan



sekadar memindahkan penduduk. Fokusnya adalah menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan, yang didukung oleh kolaborasi pemerintah, akademisi, dan partisipasi generasi muda ("Transmigrasi Patriot").

- **Pilar Utama Transmigrasi di Era Modern:**

- **Pembangunan Inklusif & Berkelanjutan:** Program transmigrasi bertujuan mengurangi kesenjangan antardaerah, mengoptimalkan potensi lokal melalui diversifikasi sektor pertanian dan nonpertanian, serta memastikan manfaat ekonomi dirasakan masyarakat transmigran maupun lokal.
- **Peran Generasi Muda (Transmigrasi Patriot):** Mengajak generasi muda, termasuk akademisi (seperti tim dari ITS), untuk menjadi penggerak ekonomi baru di wilayah baru. Ini adalah upaya memanfaatkan bonus demografi untuk membangun peradaban di luar Pulau Jawa.
- **Inovasi dan Sinergi 5T:** Kementerian Transmigrasi menerapkan 5 program unggulan: Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, dan Trans Gotong Royong.
- **Target Indonesia Emas 2045:** Transmigrasi diposisikan sebagai pilar penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen yang inklusif dan terintegrasi.
- Melalui pendekatan modern, transmigrasi menjadi bagian integral dari pembangunan manusia dan wilayah yang berkelanjutan, menjawab tantangan pemerataan penduduk, serta memperkuat persatuan bangsa.
- Menurut Menteri Transmigrasi, bonus demografi Indonesia saat ini adalah peluang emas yang harus diisi oleh anak-anak muda dengan semangat dan aksi nyata
- **Kampus Patriot Salor, Merauke, Papua Selatan (Kuota 580 Mahasiswa)**
- Terdapat 29 program studi yang ditawarkan di Salor dengan kuota penerima sebanyak 20 orang untuk setiap program studi.
- **IPB:** Teknologi Pascapanen; Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan; Manajemen Pembangunan Daerah; Ilmu Tanah; Ilmu Nutrisi dan Pakan; Bioteknologi; Ilmu Ekonomi Pertanian; dan Ilmu Gizi
- **ITB:** Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi (PIAS); Teknik Geologi; Teknik Mesin (Pertanian); dan Sistem dan Teknologi Informasi



- ITS: Teknik Lingkungan; Teknik Geomatika; Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK); dan Teknik Elektro
- UI: Teknik Sipil Peminatan Manajemen Infrastruktur; Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan; dan Ilmu Kesehatan Masyarakat
- UNDIP: Energi; dan Manajemen Sumber Daya Perairan
- UNPAD: Antropologi; Ilmu Peternakan; Pariwisata Berkelanjutan; dan Ilmu Hukum (Agraria)
- UGM: Agronomi; Ilmu Perikanan; Teknologi Industri Pertanian; dan Teknologi Hasil Perkebunan
- Direktur Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Bondan Djati Utami menegaskan Beasiswa Patriot 2026 dirancang sebagai instrumen strategis pembangunan kawasan. Program ini merupakan bagian dari skema besar Transmigrasi Patriot 2026 yang mengintegrasikan pendidikan, riset aplikatif, dan pengabdian masyarakat guna memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi berbasis ekonomi berkelanjutan.
- Direktur Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Bondan Djati Utami menegaskan Beasiswa Patriot 2026 dirancang sebagai instrumen strategis pembangunan kawasan. Program ini merupakan bagian dari skema besar Transmigrasi Patriot 2026 yang mengintegrasikan pendidikan, riset aplikatif, dan pengabdian masyarakat guna memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi berbasis ekonomi berkelanjutan.
- “Beasiswa Patriot tidak hanya kami posisikan sebagai program pendidikan, tetapi sebagai investasi sumber daya manusia untuk kawasan transmigrasi. Para awardee kami siapkan agar mampu hadir langsung di lapangan, memahami persoalan masyarakat dilapangan, dan menghasilkan solusi berbasis keilmuan yang aplikatif dan berkelanjutan,” ujar Bondan Djati Utami.
- Pelaksanaan beasiswa di tiga kawasan transmigrasi tersebut merupakan hasil pemetaan kebutuhan kawasan yang matang.
- “Setiap kawasan memiliki karakter dan tantangan yang berbeda karena itu, penempatan program studi, skema pembelajaran, hingga tugas akhir dirancang secara spesifik agar benar-benar mendukung penguatan ekonomi, kelembagaan, dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi,” kata Bondan.



**2. NOTULEN RAPAT BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan Bersama Bpk. Kepala BNPP RI, Bupati Boven Digoel dan Kepala OPD, pada Selasa 27 Januari 2026 di Jakarta**



**Usulan yang sudah disampaikan Kepada Bpk. Kepala BNPP RI**

- Perlu dilakukan validasi Data Orang Asli Papua dari Boven Digoel, termasuk OAP yang pernah Eksodus ke PNG Tahun 1984, dan Data Kependudukan ini harus divalidasi oleh Dukcapil Boven Digoel untuk diberikan Kartu Tanda Penduduk yang SAH sebagai Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai bahan pengusulan untuk Transmigrasi Lokal.
- Perlu diberikan Bantuan Perumahan bagi Penduduk Ex-eksodus Tahun 1984 yang sudah menyatakan sikap secara resmi untuk kembali ke Pangkuan NKRI dan sudah dipastikan oleh Dukcapil Boven Digoel memiliki Kartu Tanda Penduduk Warga Boven Digoel secara Resmi.
- Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-Puskesmas di tiga (3) Kecamatan dekat Tapal Batas NKRI – PNG perlu mendapat perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan.
- Kapasitas Listrik di Puskesmas-Puskesmas Boven Digoel rata-rata menggunakan Solar Cell, tetapi Kapasitasnya sangat terbatas, perlu diupgrade dengan menggunakan power dari PLN terutama yang dibutuhkan untuk Laboratorium karena tempat penyimpanan Stok Obat dan alat-alat medis yang sudah disterilkan.
- Revitalisasi Puskesmas-Puskesmas di wilayah Kabupaten Boven Digoel sebagai penopang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
- Akses Jalan dari Perbatasan PNG ke Kota Boven Digoel membutuhkan perhatian khusus dari Pusat, karena masih ditemukan akses Jalan yang kurang baik, masih ada jalan yang rusak.



- Usulan dari Kepala Dinas BNPP Boven Digoel kepada Kepala BNPP melalui Sekretaris BNPP RI untuk membangun PLBN baru di Distrik Kombut Perbatasan NKRI – PNG.
- Diusulkan kepada Kepala BNPP RI untuk memfasilitasi komunikasi dengan Menteri Kesehatan untuk mendatangkan Dokter Kontrak Nusantara yang akan ditempatkan pada Puskesmas-Puskesmas untuk melayani Masyarakat di Kabupaten Boven Digoel.
- Usulan konektivitas Jalan di Kawasan Pengembangan Perbatasan NKRI-PNG dilengkapi dengan Master Plan Peta Konektivitas yang akan disiapkan oleh Kepala Dinas PU, kemudian dilaporkan kepada Kepala BNPP RI dan Dirjen Bina Marga
- Kepala PU Boven Digoel Harus koordinasikan Peta Koridor Konektivitas Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten dengan Kepala BINA MARGA Provinsi Papua Selatan agar sinkron usulannya.
- Revitalisasi Gedung Sekolah di wilayah Kabupaten Boven Digoel sesuai dengan kondisi terkini dan Kepala Dinas Pendidikan Boven Digoel harus menyiapkan Data-data real sesuai kondisi lapangan.



**3. NOTULEN RAPAT BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan Bersama Bpk. Menteri Kesehatan RI, Bupati Boven Digoel dan Kepala OPD, Pada Rabu 28 Januari 2026 di Jakarta**



**Usulan yang sudah disampaikan Kepada Bpk. Menteri Kesehatan RI :**

1. Pendirian Prodi Profesi Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat, yang telah disetujui (Approved) oleh Menteri Diktisainristek pada tanggal 3 Juli 2025 saat kunjungan kerja ke Merauke, Dimana Fakultas Kedokteran Universitas Musamus (UNMUS) sebagai basis pengembangan SDM kesehatan lokal jangka panjang
2. Pembangunan RS Vertikal Kementerian Kesehatan di Papua Selatan, dengan kesiapan lahan milik Provinsi yang siap dihibahkan, serta telah dilakukannya visibility study pada tahun 2024 dan penyusunan masterplan
3. Upgrade RS dari Tipe D ke C, C ke B, dan B ke A sesuai arahan Bapak Wapres tgl. 4 Nov 2025 di Manokwari
4. Tunjangan Dokter Umum dan Perawat harus di berikan sebagai motivasi kinerja
5. Pembangunan RS Pratama Senggo di Kabupaten Mappi, yang diusulkan secara khusus dengan pertimbangan akses geografis yang sangat sulit (wilayah sungai dan rawa), keterbatasan transportasi dan cuaca, jarak dan waktu tempuh yang panjang menuju



RSUD Mappi maupun RSUD Merauke, serta tingginya risiko keterlambatan rujukan kasus gawat darurat. RS Pratama Senggo akan berfungsi sebagai penyangga rujukan wilayah terpencil dan penyedia layanan rawat inap dasar, kegawatdaruratan 24 jam, pelayanan maternal–neonatal, serta bedah minor

6. Pembangunan Insinerator untuk RS Boven Digoel dan MAPPI
7. Revitalisasi Puskesmas di 4 (empat) kabupaten, meliputi pembangunan Puskesmas prototipe beserta rumah dinas tenaga kesehatan, Puskesmas Pembantu (Pustu), serta pemenuhan SDM kesehatan
8. Bantuan ambulans, berupa penyediaan ambulans darat dan/atau air untuk setiap Puskesmas
9. Percepatan peningkatan tipe rumah sakit daerah di wilayah Provinsi Papua Selatan
10. Usulan melalui DAK Fisik untuk pembangunan Gudang Farmasi Provinsi dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Provinsi, sebagai bagian dari penguatan sistem layanan kesehatan Provinsi Papua Selatan
11. Penguatan SDM Kesehatan, melalui kebijakan afirmasi Orang Asli Papua (OAP) dengan prioritas rekrutmen tugas khusus bagi lulusan Poltekkes, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat (UNCEN, UNMUS, dan lainnya); program beasiswa afirmatif SDM kesehatan bagi mahasiswa baru dan ASN on going dengan batas studi normal 4 semester serta toleransi hingga 6 semester dengan ketentuan keterlambatan disebabkan kendala institusional universitas/fakultas, dibuktikan dengan surat keterangan resmi, bukan karena kelalaian mahasiswa, serta kewajiban kembali mengabdikan di Papua Selatan; dan penugasan dokter spesialis baru lulus untuk ditempatkan di rumah sakit pada 4 (empat) kabupaten di Papua Selatan



**4. NOTULEN RAPAT BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan Bersama Bpk. Dirjen Bina Marga RI, Bupati Boven Digoel dan Kepala OPD, Pada Kamis 29 Januari 2026 di Jakarta**



• **Usulan yang sudah disampaikan Kepada Bpk. Dirjen Bina Marga RI**

**Usulan Prioritas Penanganan Jalan Kawasan Perbatasan Tahun 2026 di Kabupaten Boven Digoel , meliputi:**

1. Ruas Jalan Orgenetas – Langgoan, Status Jalan Kabupaten Panjang Jalan 19,8 Km
  2. Ruas Jalan Mindiptana – Kombut, Status Jalan Provinsi Panjang Jalan 48,93 Km
  3. Ruas Jalan Inspeksi Tanah Merah – Iwot, Status Jalan Kabupaten Panjang Jalan 5,97 Km
  4. Ruas Jalan Ampera, Status Jalan Kabupaten Panjang Jalan 13,3 Km
  5. Jembatan Ruas Jalan Mindiptana – Kombut, Status Jalan Provinsi Panjang Jalan 19 Unit
- ❖ Program Kerja Preventif Maintenance untuk Jalan Nasional dari Merauke – Boven Digoel yang terhubung dengan Provinsi Papua Pegunungan, sesuai Kepmen PUPR No. 1688/2022 Tentang Penetapan Ruang Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.
  - ❖ Saran dari Bina Marga Masyarakat Lokal/Adat harus memberikan izin Akses dan ibah tanah untuk Pelebaran Badan Jalan kiri-kanan, tujuannya agar Badan Jalan tetap terlindungi dari Longsor.
  - ❖ Data Kemantapan Jalan Iwur (Batas Pegunungan Bintang/Boven Digoel – Waropko 83,64%, Panjang Jalan 26,25 KM. Preservasi Jalan Iwur (BTS. Pegunungan Bintang/Boven Digoel) – Waropko – Sumber Dana APBN - RPM



- ❖ Data Kemantapan Jalan Waropko – Mindiptana 39,80% Panjang Jalan 39,00 KM. Preservasi Jalan Waropko – Mindiptana - Sumber Dana APBN - RPM
- ❖ Data Kemantapan Jalan Mindiptana – Tanah Merah 96,99% Panjang Jalan 69,73 KM. Preservasi Jalan Mindiptana – Tanah Merah Sumber Dana APBN - RPM
- ❖ Data Kemantapan Jalan Tanah Merah – Getentiri 86,58% Panjang Jalan 72,89 KM. Preservasi Jalan Tanah Merah – Getentiri - Sumber Dana APBN - RPM
- ❖ Data Kemantapan Jalan Gententiri – BTS. Kab Merauke/Boven Digoel 95,86% Panjang Jalan 77,70 KM. Preservasi Jalan Getentiri – BTS. Kab Merauke/Boven Digoel - Sumber Dana APBN – RPM.
- ❖ Panjang Jalan Nasional di Kabupaten Boven Digoel adalah 285,57 KM dengan Total Kemantapan Jalan Rata-rata 84,99%.
- ❖ Setiap usulan Pekerjaan untuk Pembuatan atau Perbaikan jalan harus terkoneksi dengan Koridor Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten untuk memudahkan pengusulan ke Pusat, melalui Kepala Bina Marga Provinsi Papua Selatan, kemudian akan dilanjutkan ke Bina Marga Pusat.
- ❖ ISU STRATEGIS:
  - Pembangunan Infrastruktur Membutuhkan Dukungan Masyarakat
  - Masih Adanya Oknum Masyarakat Memanfaatkan Proyek Untuk Kepentingan Pribadi dan Golong (Menghambat Pekerjaan)
  - Pembangunan Jalan Baru Membutuhkan Biaya yang Mahal Akibat Kondisi Geografis Yang Berupa Rawa.
  - Terbatasnya Ketersediaan Material Lokal Untuk Bahan Pembangunan Jalan Dan Jembatan (Impor dari Luar).
  - Belum Terbukanya Akses Jaringan Jalan Sehingga Menghambat Mobilisasi.
  - Tingginya Curah Hujan
  - Kondisi Tanah Dasar Yang Lunak/Ekspansif (Kembang Susut Tinggi) Menyebabkan Konstruksi Jalan Cepat Rusak Dan Membutuhkan Biaya Konstruksi Yang Mahal.
  - Sistem Drainase Yang Tidak Maksimal Akibat Kontur Tanah Yang Datar Membutuhkan Biaya Yang Mahal (Muka Air Tanah Sangat Dekat Dengan Perkerasan Jalan).



5. **NOTULEN RAPAT BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan Bersama Bpk. Dirjen SDA RI, Bupati Boven Digoel dan Kepala OPD, Pada Kamis 29 Januari 2026 di Jakarta**



- **Usulan yang sudah disampaikan Kepada Bpk. Transmigrai RI**
- ❖ Perbaikan Taluk Pemecah Ombak Di Pantai Lampu Satu Yang Sudah Dikerjakan Pada Tahun 2025, Akan Dilanjutkan Pekerjaan itu di Tahun 2026 (Program Berkelanjutan).
- ❖ Usulan Perbaikan Drainase Perkotaan di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel.
- ❖ Perbaikan Jembatan Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten di wilayah Kabupaten Merauke dan Boven Digoel.
- ❖ Penyediaan Sumber Air Minum Yang Baru Bagi Kebutuhan Masyarakat di Kabupaten Boven Digoel.
- ❖ Usulan Untuk Pembangunan Waduk di Distrik Ninati Kabupaten Boven Digoel.
- ❖ Pemanfaatan Sungai Digoel sebagai Sumber Alternatif Air Baku yang dapat di Konsumsi langsung dengan Metode Destilasi Bertingkat.
- ❖ Penyediaan Sumur Bor Bagi Masyarakat di Boven Digoel, dan Distrik-distrik terdekat, serta Penyambungan Pipa ke Rumah-rumah warga dan Disiapkan Tempat Penyaringan Air Bersih sebelum di Salurkan ke Rumah Warga untuk mendapatkan kualitas Air yang Bersih.
- ❖ Pemasangan Taluk Penahan Situs Museum Sejarah Bung Karno DI Penjara Karena Kondisi Saat ini hampir hancur.



## **BAB III PENUTUP**

### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan sepanjang bulan Januari 2026, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) oleh Anggota BP3OKP dan Pokja Papua Sehat bersama pemerintah pusat terkait telah berjalan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus. Poin-poin penting yang menjadi kesimpulan utama adalah:

1. Transmigrasi dan Pemberdayaan Ekonomi (Kementerian Transmigrasi)
  - a. Fokus utama adalah transformasi transmigrasi menjadi strategi pembangunan kawasan yang inklusif dengan prioritas pada Orang Asli Papua (OAP)
  - b. Transmigrasi Lokal: Akan dibangun perumahan bagi OAP di Boven Digoel dengan kompensasi selama 2 tahun dan pendampingan manajemen usaha hingga mandiri
  - c. Pengembangan Perkebunan: Pengembangan perkebunan karet (dengan investor sebagai bapak angkat) dan kopi robusta yang memberdayakan transmigran lokal OAP
  - d. Pendidikan (Beasiswa Patriot): Pemberian kuota 580 mahasiswa untuk "Kampus Patriot Salor" di Merauke yang bekerja sama dengan universitas ternama (IPB, ITB, ITS, UI, UNDIP, UNPAD, UGM) guna mencetak generasi muda penggerak ekonomi kawasan
2. Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
  - a. Agenda utama berkaitan dengan validasi kependudukan di wilayah perbatasan NKRI-PNG dan peningkatan fasilitas pelayanan dasar
  - b. Validasi Penduduk Eksodus: Diperlukan validasi data OAP, termasuk penduduk eks-eksodus tahun 1984, agar mendapatkan KTP resmi dan bantuan perumahan
  - c. Infrastruktur Perbatasan: Usulan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru di Distrik Kombut dan perbaikan akses jalan dari perbatasan PNG ke Boven Digoel
  - d. Pelayanan Dasar: Peningkatan kualitas Puskesmas di perbatasan, termasuk upgrade kelistrikan dari solar cell ke PLN untuk laboratorium, serta permintaan penempatan dokter kontrak nusantara



3. Kesehatan (Kementerian Kesehatan)
  - a. Rapat menyoroti peningkatan fasilitas kesehatan rujukan dan pengembangan SDM kesehatan local
  - b. Pendidikan Kedokteran: Pendirian Prodi Profesi Kedokteran di Universitas Musamus (UNMUS) telah disetujui sebagai basis SDM kesehatan jangka Panjang
  - c. Infrastruktur Rumah Sakit: Rencana pembangunan RS Vertikal Kemenkes di Papua Selatan, peningkatan tipe RSUD (D ke C, C ke B, dst), serta usulan khusus pembangunan RS Pratama Senggo di Kabupaten Mappi mengingat sulitnya akses geografis
  - d. Fasilitas Penunjang: Pengadaan insinerator limbah medis, revitalisasi Puskesmas beserta rumah dinas, dan penyediaan ambulans darat/air
4. Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Ditjen Bina Marga)
  - a. Prioritas pada konektivitas antar-distrik dan pemeliharaan jalan nasional yang terkendala kondisi tanah rawa
  - b. Ruas Prioritas 2026: Penanganan jalan Orgenetas–Langgoan, Mindiptana–Kombut, Tanah Merah–Iwot, dan Jalan Ampera
  - c. Pemeliharaan Jalan Nasional: Program preservasi jalan poros Merauke – Boven Digoel – Pegunungan Bintang (Iwur)
  - d. Tantangan: Pembangunan terhambat oleh kondisi tanah lunak/rawa, curah hujan tinggi, minimnya material lokal, dan masalah pembebasan lahan ulayat
5. Sumber Daya Air (Ditjen SDA)
  - a. Fokus pada penyediaan air bersih dan perlindungan dari abrasi/banjir.
  - b. Air Bersih: Pemanfaatan Sungai Digoel dengan metode distilasi bertingkat dan pembuatan sumur bor untuk kebutuhan air minum masyarakat Boven Digoel.
  - c. Pengendalian Banjir & Abrasi: Kelanjutan perbaikan talud pemecah ombak di Pantai Lampu Satu (Merauke) dan perbaikan drainase perkotaan.
  - d. Situs Sejarah: Pembangunan talud penahan untuk menyelamatkan situs Museum Sejarah Penjara Bung Karno yang terancam hancur.

**Kesimpulan Utama:**

Rapat ini menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Papua Selatan melalui pendekatan Transmigrasi Lokal OAP, pemenuhan infrastruktur dasar (jalan, air, listrik), dan peningkatan kualitas SDM (kesehatan dan pendidikan) dengan



tantangan utama berupa kondisi geografis yang sulit dan perlunya validasi data kependudukan di wilayah perbatasan.

### 3.3 . Penutup

Demikian Bab Penutup ini disusun sebagai refleksi dan rangkuman atas dinamika serta capaian kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Selatan pada bulan Januari 2026. Beragamnya kegiatan yang terlaksana dengan baik adalah buah dari sinergi, dedikasi, dan komitmen bersama seluruh pihak.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada:

- Seluruh Pimpinan Pemerintah Pusat yang telah membuka ruang dialog dan koordinasi.
- Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- Sekretariat BP3OKP serta seluruh Anggota dan Kelompok Kerja (Pokja) yang telah bekerja keras.

Kami menyadari bahwa perjalanan untuk mewujudkan Papua Selatan yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Damai masih panjang. Semoga momentum dan jejaring kerja yang telah terbangun pada bulan ini menjadi landasan yang kokoh untuk aksi-aksi kolaboratif yang lebih terfokus, terukur, dan berdampak nyata di masa-masa mendatang. BP3OKP Provinsi Papua Selatan berkomitmen untuk terus menjadi bagian aktif dari solusi, mengawal dengan sungguh-sungguh setiap proses percepatan pembangunan untuk kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua”.

Merauke 09 Februari 2025

**Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan**  
  
**Joseph Yanawo Yolmen, S.Pd. M.Si, MRSC**

**NIP: 999920240117145257**